



Laporan Keuangan Melawi Kembali Raih WDP

NANGA PINOH-RK. Kabupaten Melawi kembali hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014. Hal ini berarti sudah tiga tahun beruntun, Kabupaten Melawi belum juga bisa beranjak dari opini WDP. Persoalan aset menjadi salah satu penyebabnya.

Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Abang Tajudin ditemui di kediamannya mengungkapkan, hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Melawi tahun anggaran 2014 memang masih bertahan dengan opini WDP. Sejumlah persoalan yang memunculkan pengecualian ter-

hadap laporan keuangan tersebut, diantaranya adalah banyaknya aset yang belum terdata atau tersertifikasi.

"Masalah aset inilah yang menjadi penyebab kita susah mendapatkan opini WTP dari BPK. Seperti sejumlah aset sekolah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat," ucapnya.

Tak hanya itu, aset Pemda lainnya seperti tanah dan sejumlah bangunan perkanoran, termasuk diantaranya RSUD sampai kini belum juga tuntas untuk pembelian sertifikat.

Padaahal, supaya bisa tercatat dalam neraca keuangan daerah, tanah dan bangunan tersebut harus terlebih dahulu memiliki

sertifikat sebagai bukti legal kepemilikan aset.

"Makanya ke depan ini yang harus kita perbaiki. Apabila kita ingin mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK," ingat Tajudin.

Pembenahan dan pendataan aset secara cermat dan tepat menjadi catatan oleh BPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Melawi. Pemerintah Kabupaten Melawi ke depan. Bila hal tersebut bisa diperbaiki dengan segera maka tak mustahil nantinya laporan keuangan Melawi bisa naik kelas menjadi WTP.

"Kita terus menargetkan agar penilaian BPK terhadap laporan keuangan kita bisa naik menjadi WTP pada tahun mendatang,"

harap Tajudin.

Dalam surat yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Kalbar kepada Ketua DPRD Kabupaten Melawi disebutkan bahwa ada aset tetap berupa gedung dan bangunan senilai Rp21,96 miliar yang belum tercatat atau memiliki sertifikat. Aset lain yang menjadi catatan BPK RI adalah aset konstruksi yang kini masih menjadi barang bukti sitaan kasus korupsi. Seperti proyek pembangunan sarana air bersih yang dikerjakan PT Batur beberapa tahun silam serta Kantor Bupati Kabupaten Melawi.

Reporter: Sukartaji
Redaktur: Andry Soe



Abang Tajudin. Sukartaji